

# **Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika**

## **Vol. 3, No. 1, Mei 2017**

ISSN 2477-3514

---

Judul : Local Indigenous dalam Demokrasi Modern  
Penulis : Denny Soetrisnaadisendjaja  
Diterima : Januari 2017; Disetujui Februari 2017  
Halaman Artikel : 32-40  
Dipublikasikan oleh : Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta  
Laman Online : <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika>

Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika terbit dua kali setahun pada edisi Mei dan November memuat artikel dari sosiolog, guru sosiologi, peminat sosiologi dan mahasiswa sosiologi.



**Jurusan Pendidikan Sosiologi**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

# ***Local Indigenous Dalam Demokrasi Modern***

**Denny Soetrisna AS.**

Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)  
denny.as@untirta.ac.id

## **Abstrak**

Masyarakat dilihat dari tatanan nilai yang diterapkan dalam konstruksi sosialnya terpetakan ke dalam dua kelompok yakni modern dan tradisional. Masyarakat modern menyerap nilai-nilai universal yang bersifat global seperti konsep demokrasi. Sedangkan masyarakat tradisional berdasarkan pada tatanan nilai yang berbasis pada religio magi. Perjumpaan paradigma antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional tidak dapat dihindari dan kerap terjadi kesenjangan kultur dan pemahaman. Dalam kajian ini diketengahkan perbedaan cara pandang konsep demokrasi antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern dan bagaimana masyarakat tradisional mensiasatinya tanpa terjadi *shock of cultur*. Sebaliknya, masyarakat tradisional sebagaimana ditemukan di Banten Kidul justru memberikan sumbangsih yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Kajian ini dilakukan pada masyarakat Kasepuhan Banten Kidul dengan metode fenomenologis.

Kata Kunci: *Local Indigenous*, Demokrasi Modern

## **Abstract**

*The society seen from the value order applied in its social construction is mapped into two groups: modern and traditional. Modern society absorbs universal values of global nature such as the concept of democracy. Traditional societies are based on values based on religio magi. The paradigm encounter between modern society and traditional society is inevitable and there is often a cultural gap and understanding. In this study, the differences between democracy concept between traditional society and modern society and how traditional society mensiasatinya without shock of cultur. On the other hand, the traditional community as found in Banten Kidul actually contributes to strengthen democracy in Indonesia. This study was conducted on Kasepuhan Banten Kidul community with phenomenological method..*

Keywords: *Local Indigenous*, Modern Democracy

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat nusantara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni kelompok masyarakat yang menggunakan sistem sosial modern (masyarakat modern) dan kelompok masyarakat yang masih diwarnai oleh tatanan sosial *indigenous* (masyarakat tradisional). Tatanan sosial yang masih menggunakan sistem modern dihasilkan dari mengerucutnya nilai-nilai universalitas, dimana berbagai nilai, ideologi dan konsep telah berbaur, terbentuk dengan konsensus global. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat modern ini merupakan nilai-nilai yang dianut pula oleh masyarakat global di berbagai belahan dunia. Diantara konsep dan nilai yang bersifat universal antara lain

konsep demokrasi, konsep penghargaan terhadap hak milik, konsep hak individualitas dan nilai-nilai global seperti nilai kemanusiaan, nilai individualitas dan sejenisnya masuk dan ditanamkan secara sama ke berbagai masyarakat. Tujuan nilai dan konsep global ini adalah membangun peradaban yang lebih baik, bermartabat dan menghargai hak-hak dasar manusia.

Tatanan kelompok di atas berbeda dengan tatanan sosial pada masyarakat *indigenous*. Tatanan masyarakat *indigenous* bersifat komunal, lebih mementingkan kepentingan kelompok dan lebih mengapresiasi kepemilikan kelompok daripada kepemilikan individual. Ciri lainnya adalah mempertahankan corak kelompok atau sifat-sifat yang khas kelompok. Sifat dan ciri

itulah yang dikenal sebagai identitas kultural yang berfungsi sebagai ciri dan pembeda sosial. Sedangkan nilai-nilai dan konsep yang dibangun pada tatanan masyarakat bersumber pada sistem religi atau sistem kepercayaan lokal. Oleh karena itu tatanan masyarakat tradisional yang terbentuk akan bersifat spesifik, unik dan ditopang oleh nilai-nilai identitas kultural dan religius.

Di Nusantara, sebagian komunitas *indigenous* bersikap menutup diri dengan membatasi interaksi terhadap masyarakat modern. Sikap tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh mereka untuk mencapai titik harmonis yang otentik antara nilai-nilai yang mereka anut dengan hadirnya nilai-nilai universal. Dalam pandangan mereka, interaksi dengan masyarakat modern akan menyebabkan perjumpaan nilai dan memicu perubahan sosial bagi tatanan masyarakat tradisional. Tetapi tidak sedikit pula, bahkan lebih banyak, masyarakat *indigenous* yang bersikap sebaliknya, yakni menyerap secara sistematis konsep-konsep dan tata nilai masyarakat modern untuk diintegrasikan dengan kekayaan nilai lokal. Sebagai contoh dapat dijumpai di Provinsi Banten, terdapat dua tipe masyarakat *indigenous* tersebut yakni Masyarakat Kanekes (yang cenderung tertutup) dan Masyarakat Kasepuhan (yang cenderung terbuka).

Dalam tulisan ini akan menitik beratkan kajian pada tipe masyarakat kedua, yakni masyarakat *indigenous* yang telah menyerap berbagai konsep modern seperti demokrasi, kontestasi kekuasaan (pemilihan umum), konsep pencitraan dan konsep kemitraan politik. Pada tingkat praktik, masyarakat yang melakukan penyerapan ini akan menghasilkan tatanan sosial yang unik dimana modernitas dan sifat *indigenous* teranyam menjadi satu dan membentuk ketahanan sosial.

Dengan ketahanan sosial yang unik ini, masyarakat justru memiliki tatanan yang lebih mapan. Sehingga kajian ini dapat

merumuskan hipotesis sosial bahwa nilai lokal sangat penting untuk diintegrasikan dengan nilai-nilai universal. Hipotesis ini disusun berdasarkan fakta fenomenologis bahwa masyarakat modern cenderung meninggalkan *local wisdom* dan lebih mempercayai serta menggunakan konsep dan sistem nilai universal untuk membangun masyarakat yang baru. Di antara konsep baru yang dianut adalah konsep perantingan kekuasaan melalui sistem demokrasi.

### **Problematika Demokrasi dalam Pandangan *Local Indigenous***

Sistem demokrasi dalam aplikasinya mempunyai dua sisi yang berbeda yaitu sisi ideal-ideologis dan sisi real-pragmatis. Dilihat dari sejarah panjang demokrasi (Acemoglu and Robinson, 2014), demokrasi berakar pada perseteruan religi (dominasi gereja) dengan kekuasaan rakyat di abad 17an. Maka sifat kontra religion dari demokrasi ini akan berimbas pula pada tatanan masyarakat yang justru ditegakkan dalam sistem religi. Masyarakat tradisional ditegakkan dalam sistem religi, sebab semua produk aturan (hukum), tatanan sosial, pembagian fungsi dalam masyarakat didasarkan atas azas kepercayaan. Pemilihan tetua tradisional, kepala kampung, kepala komunitas didasarkan atas sistem religi.

Salah satu manfaat yang berhasil diberikan oleh sistem demokrasi bagi tatanan sosial adalah semakin hilangnya peluang bagi kekuasaan yang despotik dan authoritarian. Sedangkan kekuasaan yang despotik dan authoritarian ini dikenal dalam paradigma konflik sosial kekuasaan pada abad 17an di Eropa. Pada masyarakat tradisional, kekuasaan yang muncul bersifat religio-magi dimana masyarakat menerima secara mutlak dan kerelaan, sehingga tidak ada pemahaman akan sifat despotik dan authoritarian yang melekat pada suatu kekuasaan.

Wajah demokrasi berpijak pada "*government of the people, by the people, for*

*the people*". Demokrasi yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan yang paling penting sekali wujudnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung-jawab kepada rakyat. Pada masyarakat tradisional, kepemimpinan dipilih berdasarkan lokus kepercayaan lokal, semacam wangsit, tuah, kepemilikan pusaka, konsep dasarnya adalah pembatiran kekuasaan dan bukan perebutan kekuasaan (Hudjolly, 2010). Pendapat Noam Chomsky (2003) tentang praktik demokrasi di Amerika juga bernada satir, bahwa demokrasi membuka peluang bagi politik lobi yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan, kuasa dan kekayaan (Walter, 2003). Mathias Brockers (2003) juga berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi membuka peluang konspirasi yang tidak akan dapat diketemukan dalam sistem religio magi masyarakat tradisional.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa spirit demokrasi yang membawa nilai universal pada sebagian paradigmanya memiliki sudut pandang yang berbeda bahkan berlawanan dengan spirit masyarakat lokal yang berbasis nilai *indigenous*. Nilai *indigenous* di seperti di Kanekes dan Kasepuhan di Banten Kidul memahami konsep kekuasaan berasal dari kuasa gaib melalui sistem wangsit. Pemahaman tentang hak individual dalam hak suara juga merupakan barang baru karena masyarakat tradisional lebih memahami hak komunal, bahwa kepemilikan akan segala sesuatu didasarkan atas kepemilikan kasepuhan (bersifat komunal dan bukan individual). Tanah dan semua sumber daya adalah milik bersama, yang dikelola berdasarkan ketundukan pada kepemimpinan ketua komunitas (Ketua Kasepuhan).

Paham kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu tulang punggung demokrasi dipahami sebagai kedaulatan aturan religio magi. Rakyat memiliki kedaulatan dan

kepemilikan sejauh sistem religio-magi, atau kepercayaan lokalnya memberikan peluang untuk itu. Jika tidak ada peluang dan kemungkinan dari religio magi maka rakyat (anggota komunitas) tidak memiliki hak. Hak melekat oleh karena aturan dan bukan melekat pada individu sebagaimana dipahami oleh nilai demokrasi modern.

Pemahaman di atas tidak dapat diketemukan dalam masyarakat modern yang sudah menerima perubahan dan nilai universal. Akan terdapat kecenderungan dari masyarakat untuk menerima bahkan mengagungkan dan mensakralkan sistem demokrasi. Memang demokrasi mempunyai idealisme-idealisme yang sangat baik walaupun tidak dapat dikatakan sempurna. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat *indigenous* lain di Indonesia, sebagaimana Masyarakat Kasepuhan di Banten Kidul juga menerima dan berkompromi dengan sistem dan nilai demokrasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa demokrasi perlu bersikap terbuka dan menerima sistem nilai masyarakat tradisional sebagaimana ditunjukkan oleh Kasepuhan Cisungsang di Banten. Tetapi bagaimana integrasi itu dapat dilangsungkan dan menghasilkan kesepahaman tentang konsep demokrasi dan nilai universal lain tanpa merusak sistem kepercayaan lokal dan bahkan memperkuat wajah demokrasi di Indonesia.

### **Integrasi Nilai Masyarakat Indigenous dalam Demokrasi Modern**

Proses dan skema integrasi itu dapat dilihat dalam fenomena Seren Taun. Dalam konteks lokal, seren taun hanyalah salah satu kegiatan religio-magi yang ada di Kasepuhan Cisungsang. Tetapi dalam perspektif ilmu sosial, Seren Taun merupakan perangkat sosial yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai masyarakat lokal dengan sistem demokrasi. Seren taun adalah kegiatan masyarakat tradisional yang bersifat terbuka untuk umum, melibatkan banyak

partisipasi, sehingga banyak pihak yang tertarik untuk datang termasuk elit politik.

### **1. Integrasi tahap Pertama**

Dalam perspektif ilmu sosial, Seren Taun dapat disebut sebagai sebuah acara kebudayaan yang sarat pesan nilai dari Masyarakat Kasepuhan kepada masyarakat modern. Bahkan secara spesifik masyarakat Kasepuhan justru memberikan undangan kepada sejumlah orang untuk hadir dalam acara Seren Taun. Munculnya praktik “mengundang” dalam seremoni Seren Taun merupakan tindakan baru yang berusaha untuk melakukan integrasi antara nilai-nilai yang dianut kelompok tradisional dengan tata nilai kelompok modern. Dalam suatu Seren Taun di Kasepuhan Cisungsang, sejumlah tokoh elit kerap kali hadir dalam acara tersebut.

Munculnya praktik ini dalam konteks ilmu sosial dapat dipahami sebagai “*a role represent the dynamic aspect of status*” (Linton 1964). Aspek yang dinamis yang dilakukan oleh Masyarakat Kasepuhan dan masyarakat modern yang diundang, dimana masing-masing pihak akan saling bertukar nilai dan saling mentoleransi nilai-nilai yang dibawa masing-masing. Elit masyarakat modern, seperti elit politik, dan elit pemerintahan yang hadir sebagai undangan, datang dengan membawa perangkat nilai “pemerintahan” dan “pejabat birokrasi” yang hal ini harus dipahami dan diakui oleh masyarakat tradisional. Sedangkan tokoh masyarakat lokal yang memberikan undangan hendak menunjukkan aspek dinamis dari masyarakat lokal yang eksis dan harus diakui oleh masyarakat modern. Pengakuan itu meliputi pengakuan atas eksistensinya dan semua sistem tradisional yang berlaku dalam masyarakat *indigenous*.

Dengan demikian, pola integrasi nilai yang pertama kali dilakukan adalah nilai pemahaman eksistensial, kelompok tradisional meminta dipahami tentang praktik tata nilai yang unik dan spesifik di daerahnya sedangkan kelompok modern

meminta dipahami eksistensi kekuasaan dan yuridiksinya. Secara sederhana tahap integrasi pertama adalah integrasi eksistensial.

### **2. Integrasi Tahap Kedua**

Sistem demokrasi bagi masyarakat modern ditandai dengan adanya praktik pemungutan suara dan pemilihan umum untuk menentukan kepemimpinan. Siapa yang berhak memimpin. Keabsahan kepemimpinan ditentukan oleh jumlah suara. Menjelang tahun 2014, silam, dimana akan terjadi hajat demokrasi pemilihan umum, karena tahap pertama integrasi sudah tercapai, maka masyarakat *indigenous* harus terlibat pula sebagai partisipan dalam pemungutan suara. Suara individual setiap anggota komunitas menjadi memiliki arti dihadapan sistem demokrasi. Sedangkan dalam sistem masyarakat tradisional itu sendiri, tidak ada hak dari suara individual anggota komunitas untuk turut serta menentukan kepemimpinan masyarakat Kasepuhan. Kepemimpinan ditentukan oleh wangsit dan aturan religio-magi.

Oleh karena suara individual masyarakat Kasepuhan diperlukan atau diperhitungkan dalam sistem demokrasi modern maka, diperlukan pemahaman dari masyarakat tradisional tentang simbol-simbol dan tatanan yang biasa digunakan masyarakat modern, misalnya atribut dan sistem partai, sistem pencoblosan, dan perangkat nilai pendukungnya. Dengan demikian, tahap kedua adalah integrasi simbolik, dimana ada penyamaan sudut pandang antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern tentang simbol-simbol yang biasa digunakan dalam peralihan kekuasaan.

Dalam setiap momen demokrasi, kehadiran masyarakat Kasepuhan dihitung sebagai individu. Oleh karena itu, Seren Taun merupakan pranata sosial yang menjadi tempat bagi aktor masyarakat Kasepuhan dan aktor masyarakat modern untuk saling bertukar peran. Peranan yang melekat pada aktor masyarakat tradisional merupakan

simbol bagi masyarakat lokal, demikian pula bagi masyarakat modern. Antar aktor ini akan memberikan *concern* dan perhatian yang sama besar akan arti penting eksistensi masing-masing kelompok, sehingga tidak ada praktik pengabaian.

**Tabel 1** Seren Taun dan Momentum Demokrasi yang Menyertainya.

Tahun Kegiatan	Momentum Demokrasi
2011	Berdekatan dengan momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
2012	Berdekatan dengan momentum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak
2013	Berdekatan dengan momentum pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD
2014	Tidak ada momentum demokrasi, tetapi muncul isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan, pemekaran daerah dari Kabupaten Lebak

Masyarakat Kasepuhan secara tradisional boleh saja mengabaikan proses hajat demokrasi apapun bentuknya, karena suara dari masyarakat kasepuhan sudah ditentukan secara religio magi melalui ketua komunitas. Pranata ini menjadi ruang temu simbolis antara struktur kepemimpinan tradisional dan struktur kepemimpinan formal untuk kepentingan yang lebih besar: negara. Ajakan untuk memilih dalam suasana demokrasi yang tidak dikenali oleh tatanan kasepuhan, dilakukan setelah adanya integrasi simbolik. Para sesepuh kasepuhan memberikan peluang bagi elit politik untuk mengajak masyarakat tradisional untuk memiliki mereka (kampanye). Meskipun elit politik memahami bahwa suara dari masyarakat tradisional ini sangat bergantung sepenuhnya pada perintah dari Ketua

Kasepuhan. Karena kepemimpinan dalam Kasepuhan bersifat *sine qua non*, bukan kontestasi, sehingga mendorong untuk ditaati secara *per se*. Sebaliknya, masyarakat tradisional menerima konsep kampanye ini sekedar “berbagi eksistensi” atau pengakuan atas eksistensi kelompok modern. Maka kampanye bukan sekedar hajat politik tetapi telah menjadi ruang kebudayaan atau *cultural understanding*.

Dari *cultural understanding* itulah muncul komitmen antara kedua kelompok. Di satu sisi, kelompok tradisional tetap memberikan dukungan penuh pada hajat demokrasi yang menjadi agenda utama masyarakat modern. Di sisi yang lain, masyarakat modern harus memberikan pengakuan (berbentuk produk peraturan daerah) dan berkomitmen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat tradisional, baik infrastruktur maupun sifat uniknya yang tidak boleh diseragamkan dengan masyarakat modern.

*Cultural understanding* ini akan berakibat pada sikap negara terhadap masyarakat lokal, misalnya tentang dukungan anggaran untuk memelihara rumah-rumah tradisional, mendorong masyarakat tradisional untuk mau bersekolah, hidup sehat, memiliki identitas, KTP, kartu keluarga bahkan hak-hak dasar lain. Namun, kehadiran demokrasi dan dampak positifnya tidak serta merta menggusur tata nilai lokal yang dianut masyarakat tradisional. Aturan dan simbol-simbol masyarakat modern hanya berlaku untuk masyarakat modern, sedangkan masyarakat tradisional tetap menggunakan atribut dan simbol masyarakat tradisional.

Tetapi, bagi masyarakat tradisional yang harus menghadapi *cultural understanding* ini bukanlah tanpa masalah. Problem yang dialami masyarakat tradisional adalah adanya keragaman dalam masyarakat modern seperti banyaknya calon kontestan dalam pemilu, banyaknya partai, banyaknya nomenklatur organisasi birokrasi yang harus dimengerti oleh masyarakat tradisional yang cenderung monokultur. Bagi masyarakat

modern, kompleksitas semacam itu dianggap implementasi dari sebuah undang-undang atau peraturan yang tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut. Sedangkan sumber utama undang-undang berasal dari konsensus politik. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat tradisional yang mendasarkan semua peraturan dari religio-magi, bukan hasil konsensus. Maka adanya keragaman dalam masyarakat modern dianggap sebagai bentuk “permainan dari kehendak” masyarakat modern itu sendiri, karena keragaman dan peraturan bukan berasal dari sesuatu yang sakral. Masyarakat modern tidak mengenal sakralitas dalam suatu aturan atau undang-undang. Meskipun masyarakat tradisional dapat mengerti dan memahami adanya keragaman dari perilaku masyarakat modern, melalui edukasi dan perkembangan pengetahuan, namun hal tersebut tetap dimengerti sebagai sesuatu yang datang dari luar kelompoknya, bukan datang dari dalam komunitas. Konsep demokrasi dan konsep kampanye datang dari luar masyarakat modern, konsep tersebut datang dari paradigma universalitas dan konsep-konsep tersebut bukan tumbuh secara original dari masyarakat modern itu sendiri, melainkan konsep yang sifatnya adoptif.

Oleh karena adanya problem tersebut, masyarakat tradisional memerlukan suatu moderasi untuk memerantarai perbedaan sudut pandang. Peran moderasi dimainkan oleh sesepuh masyarakat, yang posisinya diperoleh berdasarkan religio magi dan bukan berdasarkan pemilihan. Dalam masyarakat Kasepuhan di Banten Kidul, ketua komunitas akan mengambil sikap akomodatif terhadap segala kepentingan atau “permainan kehendak” dari masyarakat modern yang biasanya ditunjukkan secara simbolis dalam acara Seren Taun seperti kehadiran calon kepala daerah (*Kabar Banten*, 22/09/2014). Salah satu bentuk dari sikap akomodatif itu, antara lain memberikan kesempatan sambutan dan pidato, meskipun konsep pidato dan sambutan ini secara original tidak dikenali

dalam prosesi ritual Seren Taun. Secara umum sesepuh tidak melarang elit masyarakat modern untuk datang dan memanfaatkan Seren Taun sebagai ajang menjajakan citra diri (pencitraan) atau sekedar sosialisasi politik (kampanye).

Gaya moderasi dapat dipahami dalam dunia ilmu sosial dengan meminjam dari perspektif Mead (1934) tentang teori *generalized other*. Masyarakat luar Kasepuhan dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda baik secara paradigma memiliki keragaman maupun secara perilaku yang tidak didasarkan pada nilai-nilai yang sakral tetapi pada nilai-nilai formal. Pola sosial *generalized other* versi Mead dilakukan oleh masyarakat tradisional dengan prinsip *saling asah, saling asih, saling asuh*. Bentuk dari prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh, itu tercermin dalam sikap penerimaan (*cultural understanding*) dan pelayanan kepada para tamu dan pengunjung (*others*) yang semuanya berasal dari masyarakat modern. Bahkan sebagian diterima di depan *imah gede*, sebuah bangunan yang menjadi pusat kegiatan publik masyarakat tradisional. Tidak jarang, terjadi penguatan eksistensi melalui pertukaran simbol seperti diberi ikat kepala yang dipakaikan langsung oleh sesepuh komunitas. Sambutan saling asuh juga diwujudkan dalam bentuk dapur umum yang bisa diakses oleh siapa pun secara gratis selama ritual Seren Taun berlangsung. Masyarakat dengan bebas keluar masuk dapur umum untuk menikmati segala hidangan yang tersedia. Demikian pula soal tempat tinggal selama berada di Kasepuhan. Selain *imah gede* yang juga berfungsi sebagai tempat menginap para tamu, masyarakat tradisional akan menerima kehadiran pengunjung (*others*) dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat mereka menginap tanpa meminta biaya. Kebiasaan menyambut tamu dengan cara demikian tidak hanya berlaku pada saat berlangsungnya *Seren Taun* saja, tetapi juga pada hari-hari biasa. Namun, khusus pada

perayaan *Seren Taun*, selain disiapkan dapur umum, tiap-tiap rumah juga menyediakan makanan untuk para tamu atau pengunjung secara gratis. Pertukaran semacam ini pada akhirnya memberikan sifat yang terbuka bagi masyarakat tradisional secara perlahan. Akses itu bisa berupa akses ekonomi, sosial, maupun politik.

*Seren Taun* yang dihadiri ribuan orang itu sekaligus menunjukkan kekuatan eksistensi masyarakat tradisional bagi masyarakat modern. Besarnya pengaruh dan luasnya jejaring yang saat ini terjalin antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern memperlihatkan bahwa eksistensi mereka diakui, memiliki jaringan komunikasi yang luas dan lintas geografis, kultur bahkan ideologi, sehingga wajar bila banyak pihak terutama elit politik dan kekuasaan merasa memiliki kepentingan terhadapnya. Meminjam teori Mead (1934), maka hal ini merupakan keberhasilan proses komunikasi politik. Menurut Mead kehidupan sosial dapat dipahami sebagai proses, menyatakan negosiasi, dan manusia harus bekerja bersama di segala bidang kehidupan. Berdasarkan pemikiran itu, *Seren Taun* dapat dimaknai sebagai forum untuk melakukan kesepakatan (negosiasi) antarwarga masyarakat dengan pemerintah yang berkuasa. Dalam *Seren Taun*, ada pancacahan jumlah anggota komunitas, ada *show off* atas hasil panen dan kemampuan swasembada pangan, dan proses ini disaksikan oleh pemerintah sehingga dicapai negosiasi simbolik berupa *will* dan niat pemerintah untuk ikut menjaga kelangsungan komunitas tradisional.

Di sisi yang lain, kehadiran elite dan pemerintahan, kendati tidak terucapkan, menunjukkan adanya pengakuan dan legitimasi terhadap eksistensi masyarakat tradisional. Pengukuhan atas keberadaan masyarakat tradisional ini semakin terkuat manakala terjalin interaksi yang begitu intens karena bertemunya kepentingan dari pihak tokoh dari masyarakat modern dengan masyarakat

tradisional. Dalam perspektif interaksi simbolik, segala pengaruh, kelebihan dan simbol-simbol masyarakat tradisional yang berjumpa dengan paradigma masyarakat modern merupakan buah dari hasil interaksi sosial yang terjalin dalam waktu yang cukup lama. Perspektif ini menyiratkan makna bahwa individu selalu dilahirkan dari masyarakat, baik tradisional maupun modern. Karena itu, simbol dan ciri yang melekat pada diri individu muncul sebagai hasil dari interaksi. Selanjutnya ketika berlangsung interaksi dengan orang lain, individu akan melihat pada dirinya tentang bagaimana orang lain memberi penilaian, memperlakukan dan berbuat. Pada saat seperti itulah seseorang akan mengetahui posisi-posisi yang telah dibangun dan ditetapkan.

Religio magi merupakan sumber tatanan, dan memberikan otoritas serta pengaruh pada struktur sosial masyarakat. Dengan cara ini, sesepuh komunitas memiliki pengaruh bagi komunitas yang dipimpinnya, bahkan dalam hal penggunaan hak individual tetap memperhatikan instruksi dari ketua komunitas. Misalnya ketika ada instruksi untuk memilih kandidat atau partai politik yang di dukung komunitas, maka tidak ada individu yang menunjukkan penolakan. Ketaatan dan kepatuhan terhadap kehendak komunitas adalah hal yang mutlak dilakukan oleh setiap anggota komunitas tradisional. Dalam kosmologi Masyarakat Kasepuhan, Sesepuh adalah sosok yang sangat dihormati begitu rupa oleh seluruh anggota komunitas sekaligus menjadi pusat dari segala rujukan hidup dan tatanan nilai. Adapun pelanggaran atas instruksi itu berarti melanggar aturan ketentuan religio magi. Konsekuensinya adalah orang tersebut akan memperoleh sanksi sosial dan kultural, meskipun kejadian ini sangat jarang. Disamping itu, sikap tunduk dan patuh ini juga dilandasi oleh hal-hal yang bersifat rasional, dalam arti masyarakat tunduk dan patuh karena apa yang menjadi ketentuan yang digariskan oleh sesepuh adalah sesuatu yang secara logis



bisa dipahami. Di sini sesepuh komunitas berfungsi sebagai *opinion leader* atau pemuka pendapat.

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan betapa sosok sesepuh memegang peranan yang begitu penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat, dan betapa ketundukan dan kepatuhan masyarakat terhadap *opinion leader*. Di sisi lain masyarakat tradisional juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi para pihak yang memiliki kepentingan apa pun terhadap masyarakat tradisional. Menurut persepsi masyarakat tradisional, siapa pun yang datang harus diterima, dilayani dan dihormati, bahkan ketika komunikasi itu mengarah pada persoalan dukung mendukung dalam politik praktis yang sebenarnya bukan menjadi domain masyarakat tradisional. Dijadikannya masyarakat tradisional sebagai pihak yang didatangi dan diajak berkomunikasi oleh para elit politik menunjukkan bahwa masyarakat tradisional memiliki pengaruh bagi opini masyarakat modern.

Dengan demikian, kehadiran masyarakat tradisional memberikan pengaruh secara unik dalam interaksi dan tatanan masyarakat modern yang tidak saja menguntungkan secara eksistensi bagi komunitas tradisional itu sendiri, tetapi memberikan keuntungan secara politis bagi masyarakat modern. Keuntungan sosial itu berupa legitimasi dan *trust*, padahal legitimasi dan *trust* inilah dua hal yang sangat sulit ditemukan dalam struktur masyarakat modern. Legitimasi hanya diperoleh berdasarkan keabsahan legal formal. Karena itu masyarakat tradisional tetap terbuka, senantiasa menerima, mengakomodir, bahkan memediasi setiap kepentingan yang dihadapkan kepadanya, selama tidak merugikan eksistensi komunitas tradisional.

Hal ini sesuai dengan adagium politik yang berlaku saat ini; tidak ada tindakan politik tanpa adanya kepentingan, dan tidak ada kepentingan tanpa dilandasi oleh

tindakan politik. Jika dikaitkan dengan teori *The Looking Glass Self* yang dikembangkan oleh Cooley, eksistensi masyarakat tradisional terjadi karena proses yang berlanjut baik secara biologis maupun sosial. Sedangkan masyarakat dalam skala yang luas begitu bergantung pada interaksi antar kelompok komunitas yang menyumbangkan sesuatu bagi kehidupan bersama. Masyarakat modern memberikan banyak bentuk dan konsep pengetahuan yang baru dan sekaligus masyarakat tradisional juga memberikan konsep tentang konsistensi moral dan kehidupan monokultur yang egaliter (tidak despotik dan otoriter). Karena hubungan antara individu dan masyarakat sebagaimana dikemukakan Cooley (dalam Soeprapto, 2002), bukanlah realitas yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi dua sisi atau segi dari realitas yang satu dan sama.

### **Sumbangan *Local Indegenous* Bagi Tatanan Demokrasi**

Seren Taun sebagai kegiatan kebudayaan merupakan ruang publik yang strategis untuk mempertukarkan nilai dalam tahapan-tahapan yang telah disebut sebelumnya. Demokrasi yang bagi masyarakat modern merupakan proses kontestasi dapat digubah dan disentuh dengan pranata moral dan nilai-nilai yang dimoderasi oleh pihak-pihak yang berkontestasi. Demokrasi sebagai ruang perebutan kekuasaan telah sama sekali meninggalkan nilai dan bebas dari sakralitas apapun, tidak ada batasan kecuali *legal authority*. Sementara masyarakat tradisional menunjukan fakta bahwa masyarakat yang ditopang oleh sakralitas tertentu justru akan lebih mampu menyerap dan memahami perbedaan. Dalam demokrasi dan perebutan kekuasaan, perbedaan menjadi sumber friksi dan perpecahan. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan diletakkan dalam posisi yang sakral sehingga siapapun yang memegang jabatan ini akan memenuhi dirinya dengan atribut moral dan nilai, bukan atribut *power* dan *interest*. *Interest* berarti menonjolkan kepentingan diri, sedangkan

masyarakat tradisional telah menunjukkan pola hidup yang mengedepankan kolektivitas daripada individuallitas. Sehingga kepemilikan komunal di atas kepemilikan individual, *interest* komunal lebih utama dari *interest* pribadi.

Ketika para sesepuh menciptakan ruang publik tradisional seperti Seren Taun untuk mempertemukan segala macam simbol dan kepentingan maka dapat dipetik suatu pesan bahwa dalam sistem demokrasi dan kampanye politik diperlukan suatu moderator kepentingan. Dalam tatanan demokrasi saat ini, moderator kepentingan diperankan oleh tokoh partai dan elit yang justru sedang berpihak pada seorang kandidat, maka moderasi merupakan sarana untuk meraih suara. Pada Seren Taun dapat terlihat bahwa moderator kepentingan diperankan oleh pihak yang justru tidak berkompetisi dan terlibat dalam jaringan elit politik. Moderator menjadi penyelaras yang menghilangkan sifat retorika dan janji politik dalam kampanye. Moderator mengatur kepentingan rakyat (pemegang suara) agar sikap politik mereka selama masa pemilihan umum akan membawa implikasi positif bagi masyarakat pemilih itu sendiri. Moderator dapat menyaring masyarakat dari janji-janji politis yang retoris belaka. Moderator menjadi semacam gurantor atau penjamin bahwa proses pertukaran suara dan pemberian suara dukungan dalam konteks demokrasi tidak hanya menguntungkan pihak yang dipilih semata, tetap memberikan manfaat riil dan jangka panjang bagi si pemilih itu sendiri.

Seren Taun memberikan pelajaran bahwa demokrasi dan kontestasi yang memuncak pada saat pemilihan umum tidak hanya

menjadi ajang perebutan kekuasaan dan galang menggalang dukungan suara. Pemilihan umum menjadi ajang untuk mengukuhkan nilai-nilai yang disepakati bersama, dihormati bersama dan dijadikan pegangan bagi pemenang pemilu. Nilai dan sakralitas menjadi hal yang penting untuk dimasukan dalam sistem demokrasi modern, agar demokrasi tidak semata-mata bertuanan kepentingan, tetapi bertuanan nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daron Acemoglu dan James A. Robinson, 2014. *Mengapa Negara Gagal—Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Hudjolly, 2010. Relasi Simbolik Kalampoang dan Pusaka. Lihat dalam [melayuonline.com/ind/article/read/971/relasi-simbolik-kalampoang-dan-pusaka](http://melayuonline.com/ind/article/read/971/relasi-simbolik-kalampoang-dan-pusaka),
- Mathias Brockers. 2003. *Konspirasi, Teori-teori Konspirasi dan Rahasia* (terj). Jakarta: Ina Publikatama
- Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Noam Chomsky. 2003. *Hegemony or Survival: American Quest for Global Dominance*. Indianapolis: Metropolitan Books.
- Soeprapto, Riyadi, 2002. *Interaksionisme Simbolik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- William Walter. 2003. *Reaganism and the Death of Representative Democracy*. Canada. Georgetown Univ. Press.